

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN STANDARISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
WARUNG INTERNET (WARNET) DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR
KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Rahma Wahyuli Fitri

Email : rahmawahyulifitri@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri, MS

PJurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Information and communication technology is growing rapidly at the moment of iron and the internet has become a necessity to get information now , previous and forthcoming .. many problems arise because the lack of social responsibility of business owners of internet cafes , which affects both children internet misuse children , adolescents, and , dewasa.Oleh is why local governments have delegated authority to the relevant parties in the implementation of the standardization problem of internet cafes (cafe) in Kota Pekanbaru this study aims to identify and recognize , and the factors that influence the implementation of standardization policy social responsibility of internet cafes (cafe) in Kota Pekanbaru Rumbai Pesisir subdistrict .

Researchers used the theory of Van Meter and Van Horn who said that the successful implementation of a policy is influenced by the standards and policy objectives, resources, implementing organizational characteristics, komunikasi among organizations, attitudes and environmental policy implementation is the social, economic, and political. This study uses a triangulation technique is an activity check, re-check and crosscheck.

The results of this study indicate that factors that influence the implementation of the standardization policy of social responsibility in the city of Pekanbaru District of Coastal Rumbai not been implemented to the maximum. Implementation of the standards reasonably good internet cafes, the social responsibility of implementing internet cafes has not done well, the resources needed inadequate, lack of information and communication, is the refusal of the executive standardization internet shop, economic and less political support.

Keywords: Standardization Policy

PENDAHULUAN

Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi.

Namun banyak orang yang masih awam tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut. Hal tersebut terukur dari kurang optimalnya pengguna teknologi diatas, dalam kehidupan sehari-hari. Internet sangat dibutuhkan bagi Masyarakat, akan tetapi dampak dari Internet tidak hanya menimbulkan dampak Positif tetapi juga dapat menimbulkan dampak Negatif kepada Masyarakat, yaitu:

A. Dampak Positif Internet bagi masyarakat

1. Menambah wawasan dan pengetahuan
2. Mendapatkan banyak ide
3. Sarana komunikasi
4. Mencari uang melalui media internet
5. Untuk memperoleh informasi baik dalam negeri maupun mancanegara

B. Dampak Negatif Internet bagi Masyarakat

1. Pornografi
 2. Penipuan lewat internet
 3. *Cybercrime* salah satunya (*hacking* dan *cracking*)
 4. *Violence and gore* (kekejaman dan kesadisan)
 5. *Carding*
 6. Perjudian
 7. Mengurangi sifat sosial manusia
- Berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) salah satunya internet dapat dilihat

banyaknya warung internet (warnet) pada saat sekarang ini. Akan tetapi fungsi internet itu sendiri pada saat sekarang ini terjadi banyaknya penyimpangan tanggung jawab sosial, pada saat sekarang ini permasalahan yang timbul dikarenakan penyalahgunaan internet oleh seseorang bahkan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya permasalahan yang timbul salah satunya di kota pekanbaru yang mana maraknya kasus jual beli organ tubuh manusia, kasus penipuan jual beli online, kasus *hacker* seperti (pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs web, dan penyebaran virus), kasus pelecehan seksual/fonografi, perjudian online, *carding* (mencuri nomor kartu kredit orang lain), *cybersquatting* (penipuan dengan mencuri nama domain dengan cara mengambil merek dagang dengan nama orang lain, dan *cyber crime*).

Tanggung jawab sosial yaitu pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat atau norma-norma dan aturan-aturan yang merupakan landasan pedoman perilaku dalam tindakan maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan pengusaha atau calon pengusaha warung internet (warnet). Dalam sebuah warnet harus mempunyai panduan bagi praktisi Warnet untuk melaksanakan komitmen mengikat secara moral dalam praktik penyelenggaraan usaha jasa Warung Internet (warnet). Yang mana harus melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Di kota pekanbaru dapat kita lihat banyaknya pengusaha warung internet salah satunya di kecamatan rumbai pesisir, di kecamatan rumbai

pesisir ini terdapat enam kelurahan yang mana banyaknya tersebar warung internet (warnet), pengguna internet di kecamatan rumbai pesisir ini mayoritas remaja dan anak-anak yang mana lebih dituntut tanggung jawab sosial dari pemilik warung internet (warnet) untuk lebih mengarahkan kepada pengunjung warung internet (warnet).

Banyaknya kasus-kasus yang terjadi karena kelalaian dari orang terdekat, kurangnya pengarahan dari pemerintah dan pemilik warung internet (warnet) sangat berdampak bagi kelangsungan generasi kedepannya, kasus-kasus yang terjadi di kecamatan rumbai pesisir karena penyalahgunaan internet yaitu merusak anak-anak dan remaja.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tugas pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota berwenang menjalankan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian/Pengawasan Penyelenggaraan Warung Internet di Kota Pekanbaru, perlu satu pedoman yang Mengatur tentang Perizinan Pendirian Penyelenggaraan Warung Internet.

Peraturan Daerah Bab VI Pasal (7) Nomor 8 tahun 2008 tentang kewajiban setiap penyelenggara warung internet (warnet):

1. Setiap penyelenggara warung internet

- a. Berkewajiban mencegah eksploitasi akses situs-situs yang bertentangan dengan norma, agama, sosial dan hukum,
 - b. Memberikan pemahaman kepada pengguna terutama dikalangan anak-anak dan remaja tentang pemanfaatan Internet,
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban lingkungan serta perparkiran,
 - d. Membuat jadwal dan memberitahukan/ mengingatkan kepada pengguna internet jadwal/waktu ibadah,
 - e. Melarang anak-anak atau remaja menggunakan internet hingga larut malam pada hari-hari belajar,
 - f. Melarang setiap orang berinternet mengarah kepada perbuatan asusila
 - g. Mencurigai dan mencegah orang-orang yang melakukan pencurian informasi (penipuan melalui Internet).
2. Setiap penyelenggara warung internet dilarang
- a. Mengakses konten pornografi,
 - b. Mengakses konten yang melanggar kesusilaan,
 - c. Mengakses konten yang menawarkan perjudian,
 - d. Mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat tindakan merendahkan martabat maupun fisik seseorang,
 - e. Membuat berita bohong dan menyesatkan sehingga merugikan orang lain,
 - f. Membuat berita yang bertujuan untuk menumbuhkan kebencian, permusuhan, penghinaan, pengancaman, pemerasan, dan menakut-nakuti,
 - g. Memuat hak kekayaan Intelektual tanpa izin bersangkutan.

Dalam penelitian ini, penulis hanya tertarik pada, Pelaksanaan

kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet). Karena adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet). Yang mana setiap pengusaha warung internet (warnet) harus menerapkan dan melaksanakan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet). Semakin besarnya keperluan masyarakat akan informasi melalui internet, usaha Warung Internet yang semakin banyak diminati oleh para wirausaha di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalami mengenai permasalahan tersebut diatas dengan judul penelitian “Pelaksanaan Kebijakan Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Warung Internet (Warnet) di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”

Konsep Teori Kebijakan Publik

Menurut Parsons dalam Tahir (2014:24) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Menurut **Friedrich dalam Agustino (2012:7)** yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Pengertian Kebijakan menurut **Nugroho (2006: 86)** mempunyai beberapa implikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Kebijakan negara itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan daari pemerintah
2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijakan negara itu baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dye dalam **Muhlis Madani (2011:19)** mengatakan bahwa kebijakan publik mencakup pilihan-pilihan fundamental dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, dan bahwa keputusan tersebut dibuat oleh pegawai pemerintahan dan atau lembaga pemerintahan. Karena itu, kebijakan publik adalah suatu pilihan yang dibuat pemerintah untuk dijalankan dengan berbagai tindakan tertentu.

Implementasi Kebijakan Publik

George dalam Nogi (2003 : 2) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantaranya pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya

pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 158-168) Seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn juga, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan. Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

1. Standar sasaran dan kebijakan
Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut, tujuannya dapat terwujud. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumber Daya Implementasi
Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*), maupun sumber daya material (*material resources*) dan sumber daya metode (*Method resources*)
3. Komunikasi antar Organisasi

Dalam banyak program implementasi kebijakan sebagai realitas program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.

4. Karakteristik agen pelaksana
Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5. Disposisi Implementor
Dalam implementasi kebijakan, sikap dan disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal yaitu :

- a. Respons implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.
- b. Kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan, sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup Sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok memberikan dukungan implementasi kebijakan, karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada

dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Kemudian **Islami (2000 : 22)** mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebijaksanaan negara tersebut diatas mempunyai implementasi sebagai berikut :

1. bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk peraturan daerah nyata berupa penepatan tindakan-tindakan pemerintahan.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
3. Bahwa pelaksanaan negara baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditunjukkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Syukur dalam Sumaryadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksanaan (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas

permasalahan yang dikemukakan (**Sugiyono 2007:11**) Pada penelitian ini realita yang ada dilapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan alasan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dijadikan dasar untuk mendiskripsikan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Satpol PP Kota Pekanbaru, dan Kantor BPT-PM “Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru” Peneliti memfokuskan penelitian pada bagian informasi data warung internet di Kota Pekanbaru yang memiliki standar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Pasal (7) Nomor 8 Tahun 2008.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Fakta yang dibutuhkan kata-kata dan data dari informan tentang pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru dari key informan melalui proses wawancara dan pengamatan.

Untuk lebih jelasnya, dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini ditemui informan yaitu:

Gambar 1.1
Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah
Kabit KUKM (Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat) Kantor Salpol PP Kota Pekanbaru	1 orang

Kepala Bidang Pengelolaan Jasa dan Perizinan Usaha Kantor BPT-PM	1 orang
Kapolsek dan Kasium Polsek Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	2 orang
Pemilik Usaha Warung Internet di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	3 orang
Pengunjung warung internet (warnet)	5 orang

Dalam penelitian ini, mereka dijadikan sebagai key informan karena mereka pihak yang terlibat langsung dan merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru.

Teknik Pengumpulan Data

a). Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian tentang pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru.

b). Wawancara

adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan informan yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

c). Studi Kepustakaan

Suatu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur untuk

memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara, data primer ini diperoleh:

- a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru.
- b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan:
 - Satpol PP Kota Pekanbaru
 - Kantor BPT-PM “Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru”

2. Data Sekunder

Adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari pihak kedua untuk melengkapi data primer, seperti:

- a. Peraturan Perundang-Undangan dan data lain yang mendukung
- b. Peran dan fungsi pokok Satpol PP Kota Pekanbaru
- c. Peran dan fungsi pokok Kantor BPT-PM “Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru”

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan metode analisis data

kualitatif yang menggunakan pengajian data yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan yang dilaksanakan, kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dilaksanakan kemudian memperbandingkan konsep atau teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi ini dengan sumber, yang berarti membandingkan data mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check*, *re-check* dan *crosscheck* antara data dengan observasi penelitian dilapangan, yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *croosscheck* melalui persepsi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Warung Internet (Warnet) Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Dalam bab ini penulis dan menganalisa data-data yang yang

diperoleh langsung dari hasil penelitian dikantor Satpol PP Kota Pekanbaru, Kantor BPT-PM, dan Polsek Rumbai Pesisir yang berhubungan dengan Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Warung Internet (Warnet) Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Warung Internet (Warnet) Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru .

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Bab VI Pasal (7) tentang kewajiban setiap penyelenggara warung internet (warnet), terutama kewajiban dalam tanggung jawab sosial pelaksana warung internet penyelenggaraan ini dibuat bertujuan agar setiap penyelenggara warung internet (warnet) sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dan berlangsung dengan baik. Dimaksudkan agar tidak adanya penyalah gunaan dan penyimpangan dari warung internet baik dari pemilik maupun pengunjung warung internet (warnet) yang berdiri terutama di kecamatan rumai pesisir.

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan bagaimana variabel-variabel implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Bab VI Pasal (7) tentang kewajiban setiap penyelenggara warung internet. Implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan setelah satu kebijakan pemerintah dirumuskan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

dalam bentuk kebijakan. Implementasi kebijakan ini juga dapat dilihat dari kesesuaian antara kegiatan yang telah di desain dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Dalam bab ini akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Kantor BPT-PM Kota Pekanbaru, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, dan Polsek Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi yang dilakukan guna mengetahui Bagaimana pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru.

Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan standarisasi warung internet (warnet) di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari yang menanyakan apakah prakondisi untuk kebijakannya yang berhasil. Untuk itu dipertimbangkan faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Penulis meneliti yang meliputi variabel-variabel sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya Implementasi
3. Komunikasi antar Organisasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Disposisi Implementor
6. Kondisi Lingkungan, Sosial, Politik, dan Ekonomi

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut menurut jawaban dari wawancara terhadap informan yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut diatas

Standar Dan Sasaran Kebijakan

Tujuan kebijakan dan standar yang jelas yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Kinerja pelaksanaan kebijakan standarisasi warung internet (warnet) dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realitis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Van Mater dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) sangatlah penting. Implementasi pelaksanaan kebijakan standarisasi warung internet (warnet)

yang berhasil, bisa menjadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*official*) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementor mungkin bisa dalam melaksanakan kebijakan, dikarekan mereka menolak atau tidak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Sumber Daya Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya implementasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.

Dukungan fasilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan (sarana dan prasarana). Selain sumber daya

berupa staff, dukungan pelaksana yang tidak kalah pentingnya ada sumber daya wewenang, sebab dengan adanya pelimpahan tersebut pelaksana dapat mengimplementasikan secara efektif. Para pelaksana merupakan faktor vital dalam implementasi kebijakan, karena apapun jenis kebijakan itu pasti memerlukan dukungan staff yang memadai. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah yang di embankan atau tanggung jawab maupun kemampuan dan keterampilan yang dimiliki baik secara teknis maupun manajerial.

Komunikasi antar Organisasi

Menurut Van Mater dan Van Horn apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh individu (*implementors*) pelaksanaan kebijakan standarisasi warung internet (warnet) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana standarisasi warung internet (warnet).

Komunikasi merupakan alat pengirim atau penyampaian perintah-perintah atau arahan informasi bertujuan menghasilkan dampak kognisi maupun afeksi. Ketidak jelasan pemerintah dan arahan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan akan memberikan pelaksanaan dilapangan pada situasi yang tidak pasti dalam mengimplementasikan kebijakan. ini juga berarti menghadapkan para pelaksana dalam keadaan kesukaran dalam mengimrimkan perintah dan arahan kepada kelompok sasaran.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan kegiatan dengan demikian pula dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksananya, konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Karakteristik Agen Pelaksana

Yaitu sikap para agen pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat, motivasi untuk melaksanakan program. Adanya pemahaman dan pengetahuan, arah respon, dan motivasi para pelaksana terhadap pelaksanaan standarisasi tanggungjawab sosial warung internet.

Dapat juga dikatakan bahwa sikap seseorang itu merupakan perpaduan antara keadaan masa lalu dengan keadaan lingkungan masa sekarang, tetapi kondisi seperti ini masih menjadi pertanyaan lebih lanjut bagaimana kondisi masa lalu itu sama kondisinya dengan masa sekarang. Faktor lainnya adalah sikap seseorang berkaitan dengan prasangka. Prasangka ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif.

Karakteristik disini yang dimaksud sebagai sikap para agen pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan

efesien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Disposisi Implementor

Kecendrungan-kecendrungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana kebijakan dari pemerintah. pemerintah harus memiliki watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagai aparat pemerintahan harus adanya pemahaman atau konsistensi yang sama tentang isi kebijakan dan pelaksana kebijakan, adanya itikad baik dari masyarakat dan tanggung jawab masyarakat untuk menaati aturan yang berlaku, adanya pemahaman yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi dari kebijakan pelaksanaan standarisasi warung internet (warnet). Hal ini sangat mungkin terjadi, kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan. ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan standarisasi warung internet (warnet), antara lain sebagai berikut :

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan.
2. Arahan dan tanggapan pelaksana yang meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dan menyikapi kebijakan.
3. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana yaitu seberapa besar respon individu dalam pelaksanaan kebijakan standarisasi warung internet (warnet) di kota pekanbaru.

Seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan standar kebijakan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan standarisasi warung internet (warnet). Para pelaksana dituntut agar dapat memahami tujuan dan standar pelaksanaan standarisasi warung internet (warnet). Kemudian apabila sikap pelaksana menerima berbagai perubahan dari suatu kebijakan pemerintah maka pelaksanaan standarisasi warung internet (warnet) akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setelah para pelaksana memahami tujuan dan standar pelaksanaan standarisasi warung internet (warnet) maka para pelaksana dapat menerima kebijakan tersebut untuk dilaksanakan. Sikap penerimaan dari pelaksana menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan. setelah pelaksanaan standarisasi warung internet (warnet) di terima baik oleh pelaksana, maka pelaksanaan standarisasi warung internet (warnet) akan mendapatkan respon yang baik dari pelaksana warung internet (warnet).

Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan eksternal tersebut misalnya lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang kondusif sehingga dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan standarisasi warung internet. lingkungan eksternal tersebut meliputi apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut dan apakah elite (kelompok yang berkuasa) mendukung implementasi. Ekonomi masyarakat di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru dapat menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan standarisasi warung internet dalam tanggung jawab soialnya. Artinya perekonomian masyarakat dikecamatan rumbai pesisir penentu dalam menerapkan fasilitas yang lebih lagi dalam menjangkau informasi dan komunikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Pelaksanaan ialah melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang telah disusun dan terperinci untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan, dilihat dari pelaksanaan

yang dilakukan oleh instansi terkait sudah berjalan namun hasilnya belum maksimal. Dari keenam variabel faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan standarisasi tanggung jawab sosial warung internet (warnet) di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru :

1. Standar dan sasaran kebijakan pelaksanaan standarisasi warung internet sudah tepat sasaran, namun standar yang telah ditetapkan dari kebijakan Perda ini belum terlaksana dengan baik oleh pelaksana warung internet (warnet).
2. Sumber daya implementasi yang bekerja di lapangan maupun di kantor sudah cukup memadai, namun masih adanya sedikit kendala dari staf yang bekerja di lapangan masih kurangnya transportasi untuk pengangkutan barang yang disita dari warung internet.
3. Perda pasal (7) nomor 8 tahun 2008 tentang pelaksanaan standarisasi warung internet dalam komunikasi antar organisasi cukup baik, namun masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan implementor.
4. Karakteristik agen pelaksana yang berbeda-beda namun sesuai dengan fungsi, pengetahuan dan kemampuan cukup baik untuk melaksanakan kebijakan pelaksanaan standarisasi warung internet agar mencapai keberhasilan kebijakan untuk di implementasikan.
5. Sikap para implementor dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kemampuan dan

konsistensi yang sama dalam melaksanakan kebijakan adanya etika baik dari masyarakat dan tanggung jawab dari masyarakat untuk mentaati aturan, dan aparat pemerintahan harus lebih bersikap tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada pelaksana warung internet yang melanggar aturan standarisasi.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, politik yang tidak mendukung juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan standarisasi warung internet (warnet), dan harus ada kerja sama lebih lagi antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai keberhasilan kebijakan ini agar tidak adanya lagi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana warung internet.

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang pelaksanaan standarisasi warung internet yang menentukan sebuah kebijakan itu terlaksana dan berhasil jika memiliki standar dan sasaran yang jelas. Sumber daya implementasi yang mempunyai kemampuan sesuai dan memadai, tanpa adanya sumber daya akan banyak mengalami suatu kegagalan. Komunikasi antar organisasi ini sangat penting bagaimana seorang implementor menyampaikan suatu kebijakan kepada bawahannya untuk di implementasikan dan bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak adanya kesalahan dan mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Karakter agen pelaksana untuk menjalankan dan menerapkan kebijakan. Disposisi implementor dalam menerapkan dan memberikan sanksi yang tegas karena konsistensi dari implementor sangat diperlukan.

Dan kendala gagalnya implementasi yaitu lingkungan ekonomi, sosial, politik karena perekonomian masyarakat yang menengah kebawah, lingkungan sosial yang tidak baik dan kurangnya perhatian dari pemerintah mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan standarisasi warung internet.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dirumuskan maka penulis memberikan sebagai berikut :

1. Para implementor hendaknya lebih meningkatkan standar dan sasaran kebijakan agar dapat mencapai keberhasilan suatu kebijakan.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membagi-bagi tugas agen pelaksana yang turun kelapangan untuk menertibkan warung internet (warnet) yang tidak sesuai standar, agar kebijakan ini berjalan dengan baik dan tidak ada lagi penyimpangan pelaksanaan standarisasi warung internet.
3. Kepada pihak yang telah di berikan wewenang agar meningkatkan sosialisasi melalui semua media mengenai kebijakan pelaksanaan standarisasi warung internet.
4. Implementor harus lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyikapi dan melaksanakan tugas yang mereka emban masing-masing sesuai fungsinya.
5. Seharusnya sikap dari implementor lebih tegas lagi dalam mengawasi pelaksanaan standarisasi warung internet, agar memberikan sanksi yang lebih tegas

lagi agar memberikan efek jera kepada pelaksana warung internet.

6. Kepada pihak implementor seharusnya juga harus memperhatikan dan memberikan jalan keluar bagi lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan publik*. Jakarta: Salemba Humnika
- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta:CV. Alfabeta
- Islami, M. Irfan, 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Madani, Muhlis, 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Graha Ilmu
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- , 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia
- , 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasalong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- , 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

- Suharno, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak Dua
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau. Pekanbaru
- Sumaryadi, Nyoman I, 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama
- Sunggono, Bambang, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Srafindo Persada
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, Lenlit UNPAD
- Tangkilisan, Hessel, Nogi, S 2003. *Kebijakan Publik yang membumi*, Yogyakarta: Lukman Offset
- Winarno, Budi, 2002. *Teori Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- , 2012. *Kebijakan publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps
- Sumber Lain:
<http://danzomiasa4.blogspot.com/2012/11/pengertian-tik.html>
<http://khusus-tugas.blogspot.com/2012/11/manfaat-serta-dampak-internet-kepada.html>
<https://thewiera.wordpress.com/2012/05/06/kasus-di-internet/>